



Negara, Korporasi, dan Masyarakat Sipil: Dinamika Demokrasi dalam Konflik Agraria Kendeng, Jawa Tengah

Mega Arinda Pramessella^{1*}, Tias Rahma Dewi², Revalyza Misbah³, Nurdin⁴,
Fullah Jumaynah⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: 2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract. *The agrarian conflict in the Kendeng Mountains, Central Java, arose due to the construction of a cement factory by PT Semen Indonesia, which was supported by the state through the issuance of environmental permits, even though several permits had been revoked by court decisions. The local community rejected the project because it threatened their water sources, environment, and livelihoods. This study aims to analyze the relationship between the state, corporations, and civil society in the agrarian conflict in Kendeng, as well as the role of civil society movements in responding to this conflict. The research uses qualitative methods with a literature study of journals and related news reports. Using Karl Marx's theory of conflict and Charles Tilly's theory of social movements, the study finds that the state tends to side with corporate interests, while civil society continues to build resistance through collective action, legal advocacy, public campaigns, and ecofeminist movements. The Kendeng conflict reflects the imbalance of power relations and the weakness of substantive democracy in natural resource management. The need for increased transparency in licensing, community participation, and ecological protection are the main solutions.*

Keywords: *Agrarian Conflict; Civil Society Movement; Kendeng Mountains; Power Relations; PT Semen Indonesia*

Abstrak. Konflik agraria yang terjadi di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah muncul akibat adanya pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia yang didukung negara melalui penerbitan izin lingkungan, meskipun beberapa izin telah dibatalkan oleh putusan hukum. Masyarakat lokal menolak proyek tersebut dikarenakan dapat mengancam sumber air, lingkungan, serta keberlangsungan ruang hidup mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil dalam konflik agraria di Kendeng serta peran gerakan masyarakat sipil dalam merespons konflik ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka terhadap jurnal, dan pemberitaan terkait. Dengan menggunakan teori Konflik Karl Marx dan teori Gerakan Sosial Charles Tilly, penelitian menemukan bahwa negara cenderung lebih berpihak pada kepentingan korporasi, sementara masyarakat sipil terus membangun perlawanan melalui aksi kolektif, advokasi hukum, kampanye publik, dan gerakan ekofeminisme. Konflik Kendeng mencerminkan ketimpangan relasi kuasa serta lemahnya demokrasi substantif dalam pengelolaan sumber daya alam. Perlunya peningkatan transparansi perizinan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ekologis menjadi solusi utama.

Kata Kunci: Gerakan Masyarakat Sipil; Konflik Agraria; Pegunungan Kendeng; PT Semen Indonesia; Relasi Kekuasaan

1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang terus hadir dan berulang dalam berbagai bentuk. Indonesia pada dasarnya merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di perairannya. Kondisi alam seperti ini berpotensi menghadirkan sumber perekonomian yang besar dan aset berharga untuk masyarakatnya. Namun, dibalik berkelimpahan sumber daya alam tersebut, juga membuka peluang terjadinya konflik agraria yang cukup besar, seperti perebutan lahan perkebunan, lahan pertanian, hingga perebutan kawasan hutan turut menjadi bagian dari sejarah di Indonesia (Subekti, 2016). Salah satu kasus yang menonjol beberapa tahun lalu adalah

konflik pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Dalam konflik tersebut, melibatkan negara (pemerintah) sebagai pembuat izin dan kebijakan, korporasi sebagai pelaku ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, dan juga masyarakat sipil sebagai pihak yang terdampak dan memperjuangkan haknya. Pegunungan ini membentang dari Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Grobogan (Wulandari dkk, 2019). Rencana pembangunan pabrik semen memicu perlawanan dari masyarakat sekitar pegunungan yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan sumber daya alam pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Dalam proses pembangunan nasional khususnya ekonomi, tanah dan sumber daya alam seringkali dijadikan objek perebutan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda. Bagi masyarakat pedesaan, tanah bukanlah sekadar aset ekonomi saja, melainkan ruang hidup, identitas budaya, dan sumber keberlangsungan sosial. Korporasi melihat Pegunungan Kendeng ini sebagai kawasan strategis membuat pabrik semen, karena di dalamnya terdapat karst berisikan batu gamping yang merupakan bahan baku pembuatan semen. Masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen tersebut, karena dinilai akan mengancam keberlangsungan hidup mereka dan lingkungan di masa depan. Kawasan tersebut dikenal sebagai wilayah resapan air yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, serta keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat agraris di sana (Talitha dkk, 2025). Di sisi lain, pemerintah sebagai aktor utama dalam pembuatan perizinan dan penentu arah kebijakan, justru memberikan izin pendirian pabrik semen tersebut dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan (Wulandari dkk, 2019). Dalam hal ini, korporasi yakni PT Semen Indonesia menjadi pihak yang diuntungkan dari keputusan pemerintah tersebut. Korporasi mendapat perizinan legal untuk menjalankan aktivitas pertambangannya, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam di Pegunungan Kendeng untuk kepentingan ekonomi. Selain itu, konflik ini juga dipicu adanya tumpang tindih atas klaim tanah, di mana masyarakat mengklaim, bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah dan kultural, sementara bagi pemerintah dan pengusaha, tanah tersebut merupakan wilayah yang strategis dan berpotensi untuk pembangunan (Maharani, 2024).

Konflik ini dapat menjadi simbol perbedaan kepentingan, antara ekonomi atau lingkungan, sekaligus dapat menunjukkan bagaimana demokrasi substantif diuji dalam pembangunan. Dalam konflik ini, pemerintah dinilai tidak netral dan lebih berpihak pada pemerintah (Talitha dkk, 2025). Dikarenakan melalui jalur mediasi tidak memberikan jawaban atas aspirasi masyarakat, oleh karena itu, masyarakat sipil setempat berusaha untuk

memperjuangkan hak-haknya melalui berbagai strategi perlawanan, yakni melalui jalur hukum dan aksi kolektif seperti bersama JMPPK atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Selain itu, adapun gerakan masyarakat sipil yang dilakukan oleh para perempuan, yakni Gerakan Ekofeminisme. Gerakan ini dilakukan para perempuan Kendeng sebagai bentuk ekspresi penolakan, dengan cara aksi semen kaki di depan Istana Negara pada tahun 2016 (Wulansari dan Sigit, 2017).

Adapun penelitian yang dilakukan Analissa Huwaina, Anindita Prabawati dan Anindya Dewi, yang berjudul “Konflik pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx)” yang bertujuan untuk menjelaskan konflik yang terjadi terhadap penolakan pembangunan pabrik semen di Kendeng. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meski dilakukan berbagai upaya hukum untuk menindaklanjuti penolakan pembangunan pabrik, pada pelaksanaannya keputusan pembangunan tersebut tetap dilakukan dengan pemberian izin oleh kewenangan daerah. Perbedaan yang dimiliki oleh kedua penelitian ini, yaitu pada penelitian Huwaina dkk lebih berfokus pada analisis konflik Kendeng dalam pemikiran Karl Marx, sedangkan pada penelitian penulis lebih membahas terkait hubungan konflik Kendeng antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil. Penelitian lainnya ditulis oleh Dhanyra Nayla Talitha, Yulia Putri & Deni Angela, yang berjudul “Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Kendeng Utara dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang” dengan tujuan menganalisis akar permasalahan terjadinya konflik antara masyarakat Kendeng di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan PT Semen Indonesia dan meninjau berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Perbedaan yang dimiliki yakni penelitian Talitha dkk berfokus pada akar konflik dan upaya penyelesaian melalui teori ekosentrisme, sementara penelitian penulis menekankan politik kekuasaan dalam relasi antara negara, korporasi dan masyarakat sipil serta bagaimana masyarakat membangun gerakan perlawanan menggunakan teori konflik (Karl Marx) dan gerakan sosial (Charles Tilly). Selanjutnya, penelitian Enkin Asrawijaya, yang berjudul “Gerakan Ekopopulisme komunitas Samin melawan perusahaan semen di pegunungan Kendeng” dengan tujuan untuk memahami munculnya gerakan ekopopulisme komunitas Samin sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada sudut pandang penelitian yang dilakukan oleh Asrawijaya menyoroti pada dinamika gerakan masyarakat, sementara penelitian penulis menekankan pada dimensi demokrasi dalam interaksi tiga aktor seperti negara, korporasi, dan masyarakat sipil.

Melihat adanya dua kepentingan yang saling bersinggungan ini menunjukkan bagaimana relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil menimbulkan permasalahan dalam praktik demokrasi di tingkat lokal. Sikap pemerintah dalam konflik ini, menunjukkan adanya orientasi pembangunan yang lebih menekankan pada kepentingan aspek ekonomi daripada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dikaji, karena bertujuan untuk memahami hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil dalam konflik agraria di Kendeng, Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menggali peran yang dilakukan masyarakat sipil melalui gerakan gerakan yang bertujuan mempertahankan hak mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Konflik (Karl Marx)

Konflik terjadi akibat adanya hubungan sosial, ekonomi, politik, yang dasar penyebabnya adalah perebutan kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan juga ketersediaan dan distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam masyarakat (Setiadi & Kolip, 2013; Huwaina dkk, 2024). Karl Marx berkolaborasi dengan Engels, dan menerbitkan karya *Manifesto Komunis* (1848), buku ini menjadi fondasi bagi teori sosial yang membahas tentang konflik kelas dan perubahan sosial (Prayogi dkk, 2025). Karl Marx menjelaskan bahwa kelompok masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Kelas penguasa mempertahankan dominasinya karena memiliki keunggulan ekonom yang sudah berlangsung lama, sementara kaum proletar mengalami kesulitan dalam meningkatkan status sosialnya. Marx memandang masyarakat sebagai tempat terjadinya konflik antara kelas-kelas sosial dan Marx meyakini bahwa peran dan fungsi lembaga sosial hanya bisa dipahami melalui struktur ekonomi yang mendasarinya (Omer & Jameen, 2016; Huwaina dkk, 2024). Akar penyebab konflik adalah distribusi kekuasaan dan kekayaan yang tidak merata, sehingga terciptanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat, dan kekuasaan tersebut mencakup akses ke sumber daya yang ada. Karl Marx menggambarkan teori konflik berdasarkan jumlah konsep penting yang berkaitan seperti kelas sosial, kekuasaan, perubahan sosial, dan negara yang saling berkaitan. Marx memandang bahwa konflik sosial akan mencapai titik puncak jika kaum proletar menyadari posisi mereka dalam sejarah (Huwaina dkk, 2024).

Dalam konteks konflik yang terjadi karena adanya pembangunan pabrik semen, di Kendeng bahwa minimnya informasi dari pemerintah, memicu penolakan masyarakat terhadap aktivitas PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng. Berdasarkan teori konflik Karl Marx, konflik ini mencerminkan pertentangan antara dua kelas sosial yaitu kaum borjuis (PT Semen

Indonesia) yang melihat pegunungan sebagai sumber modal ekonomi melalui eksploitasi batuan karst, dan adanya kaum proletar (masyarakat Kendeng) yang menggantungkan hidupnya oleh sumber daya air dari pegunungan tersebut untuk pertanian (Talitha dkk, 2025). Teori konflik Karl Marx memberikan kerangka analisis yang kuat dalam melihat bagaimana adanya ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya alam yang dapat memicu konflik sosial antara kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan kelompok masyarakat yang terdampak.

Teori Gerakan Sosial (Charles Tilly)

Gerakan sosial sebagai perilaku kolektif yang bertujuan untuk mendorong atau menolak perubahan sosial menjadi subjek kajian dalam ilmu sosial, gerakan ini merupakan upaya yang dikelola oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu, yang seringkali dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu kalangan (Hadi dkk, 2025). Charles Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai “serangkaian interaksi berkelanjutan” antara otoritas dan para penentangannya dalam pembuatan tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen atau kelompok tertentu (Syawaludin, 2017). Dalam menganalisis gerakan sosial, Tilly menjelaskan adanya tiga elemen fundamental. Ketiga elemen tersebut meliputi kampanye (*campaign*), yaitu serangkaian klaim atau tuntutan yang ditujukan kepada pihak berwenang, selanjutnya terdapat repertoar (*repertoire*), yaitu kumpulan tindakan kolektif yang dilakukan secara berulang seperti tindakan demonstrasi, petisi, atau aksi simbolik, serta etalase WUNC (*worthiness, unity, numbers, and commitment*) yang menggambarkan bagaimana masyarakat menunjukkan kelayakan, persatuan, jumlah, dan komitmen mereka dalam perjuangan (Hadi dkk, 2025). Kombinasi dari ketiga unsur ini menjadi sebuah gerakan sosial yang mampu memperlihatkan kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan terorganisir. Teori gerakan sosial Charles Tilly tidak hanya memandang aksi protes sebagai reaksi, tetapi sebagai proses yang terstruktur, di mana masyarakat sipil membangun kekuatan kolektif untuk menantang dominasi negara maupun kepentingan ekonomi yang merugikan kelompok lemah.

Dalam konteks konflik agraria Kendeng, Jawa Tengah, teori gerakan sosial Tilly relevan karena dianggap menjelaskan bagaimana masyarakat sipil di Kendeng membangun aksi yang kolektif untuk mempertahankan hak atas ruang hidup dari tekanan negara dan korporasi. Gerakan masyarakat seperti Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) serta aksi perempuan Kendeng mencerminkan terjadinya praktik nyata dari teori gerakan sosial (Talitha dkk, 2025). Mereka mengorganisir bagaimana kampanye, aksi damai, hingga simbol budaya untuk memperjuangkan keadilan terhadap lingkungannya. Hal ini

menunjukkan bahwa gerakan sosial berfungsi sebagai wadah yang demokratis dalam menyalurkan suara masyarakat, juga sebagai bentuk kontra kekuasaan terhadap wacana pembangunan pabrik semen yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal (Sufyan, 2015). Teori gerakan sosial Charles Tilly menggambarkan bahwa adanya gerakan sosial yang dijalankan dalam dinamika demokrasi substantif yang terjadi terhadap antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil di tengah konflik agraria yang terjadi di Kendeng, Jawa Tengah.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dalam memahami secara mendalam dinamika relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil dalam konflik agraria di Kendeng. Pendekatan ini berfokus pada analisis konsep, teori, serta temuan terdahulu. Data penelitian berasal dari sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, hingga pemberitaan media terpercaya yang relevan dengan isu agraria, demokrasi, dan gerakan masyarakat sipil. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yakni inventarisasi literatur untuk mengumpulkan sumber bacaan yang sesuai dengan topik, lalu seleksi sumber berdasarkan kredibilitas dan relevansinya, pengelompokan informasi sesuai tema seperti peran negara, kepentingan korporasi, dan strategi gerakan masyarakat sipil, serta pencatatan informasi menggunakan teknik *note-taking* agar data tersusun secara sistematis. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dimulai dari proses reduksi data dalam menyaring informasi penting, penyajian data dalam uraian yang terstruktur, hingga interpretasi data menggunakan teori konflik Karl Marx dan teori gerakan sosial Charles Tilly dalam melihat pola relasi kekuasaan serta dinamika gerakan masyarakat pada konflik agraria di Kendeng. Melalui tahapan ini penelitian mampu dalam menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik demokrasi, ketimpangan relasi kuasa, dan peran masyarakat sipil dalam konflik agraria di Kendeng.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Negara, Korporasi, dan Masyarakat Sipil dalam Konflik Agraria Kendeng

Kekayaan sumber daya alam di sekitar pesisir pantai Pulau Jawa yang dibentangi oleh Pegunungan Karst, menjadikan daerah tersebut memiliki potensi utama sumber daya alam berupa batu kapur yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Melihat adanya potensi tersebut, membuka peluang untuk perusahaan mendirikan pabrik semen, seperti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Namun, rencana pendirian pabrik semen tersebut,

mengundang berbagai dukungan dan penolakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi pendirian pabrik semen. Rencana pendirian pabrik tersebut tidak hanya melahirkan perbedaan pandangan antara masyarakat yang mendukung dan menolak, tetapi juga menimbulkan konflik sosial. Pendirian pabrik semen yang direncanakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tersebut melahirkan sengketa, di mana terdapat dua pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan dalam satu masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama (Khusnia, 2018). Pada kasus ini, negara, korporasi, dan masyarakat sipil memiliki perbedaan kepentingan dan berada dalam struktur kekuasaan yang tidak setara. Negara lebih cenderung berpihak kepada korporasi dengan dalih untuk perekonomian Indonesia melalui kebijakan dan perizinan yang ditetapkan, sementara masyarakat menjadi aktor yang melakukan penolakan dengan dalih untuk mempertahankan lingkungan, ruang hidup, dan hak-hak dasarnya (Khusnia, 2018).

Hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil menjadi timpang dan tidak seimbang, diawali dengan masyarakat yang tidak diberi informasi terkait rencana pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia pada tahun 2011 dan 2012, yang kemudian pada tahun 2014 dilakukan peletakan batu pertama yang akan dijadikan kawasan pabrik semen (Juniarto, 2018). Hal tersebut yang menjadi percikan awal dari ketegangan hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil. Namun, dalam hal ini, negara semakin memperkuat ketegangan ketika menerbitkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012, yang memberikan izin lingkungan bagi PT Semen Indonesia untuk menambang batu kapur di Pegunungan Kendeng Utara. Penerbitan izin tersebut bertentangan dengan berbagai aturan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan dan konservasi sumber daya air, serta Pasal 25 Ayat (1) yang menegaskan bahwa CAT adalah wilayah konservasi sumber daya alam yang harus dilindungi (Talitha dkk, 2025). Namun, wacana ingin meninjau ulang kebijakan ini, pemerintah justru memperkuat legitimasi perusahaan dengan menerbitkan izin baru, bahkan setelah Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK 2012 tersebut tidak berlaku. Ketika SK 2012 tersebut dicabut, pemerintah mengeluarkan izin baru yakni SK No. 660.1/20 Tahun 2016, lalu kembali menerbitkan SK No. 660.1/6 Tahun 2017, yang pada prakteknya tetap mengizinkan operasi penambangan (Talitha dkk, 2025). Realitas ini menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap kepentingan PT Semen Indonesia bahkan di tengah putusan hukum yang mengikat.

PT Semen Indonesia sebagai korporasi hadir dengan kepentingan modal dan ekspansi industri, yang membangun narasi bahwa pendirian pabrik tersebut akan membangun

kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, pada realitanya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pabrik semen tersebut cukup besar, seperti penurunan debit air, pencemaran debu, kerusakan lahan pertanian, gangguan kesehatan masyarakat dan menurunnya kualitas hidup masyarakat (Juniarto, 2018). Meski demikian, perusahaan memberikan kompensasi yang tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Kompensasi pun lebih banyak diberikan untuk kelompok masyarakat yang pro dengan pendirian pabrik tersebut (Talitha dkk, 2025). Sementara itu, masyarakat sipil menjadi aktor yang terdampak sekaligus yang paling aktif melakukan perlawanan, karena bagi mereka Pegunungan Kendeng merupakan sumber penghidupan mereka yang harus dijaga dan tidak boleh di eksploitasi. Mereka telah melakukan berbagai perlawanan seperti mendirikan tenda perjuangan, aksi longmarch Rembang-Semarang, pemblokiran jalan masuk tambang, hingga aksi *iconic* yakni menyemen kaki di depan Istana Merdeka. Selain itu, mereka juga telah melakukan perjuangan melalui jalur hukum dan advokasi yakni ke PTUN Semarang, PTTUN Surabaya, hingga ke Mahkamah Agung (Talitha dkk, 2025).

Hubungan timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil seperti ini, memecah hubungan sosial dan menciptakan polarisasi kelompok pro-tambang dan anti-tambang. Terlebih, adanya intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi masyarakat penolak tambang semakin memperkuat ketegangan sosial (Talitha dkk, 2025). Pemerintah yang seharusnya menjadi mediator, justru gagal dalam merespons aspirasi masyarakat dan memperkuat posisi korporasi dalam konflik ini.

Peran Gerakan Masyarakat Sipil dalam Penolakan Pabrik Semen di Kendeng

Gerakan masyarakat sipil dalam konflik agraria Kendeng terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Dalam hal ini, masyarakat sipil tidak hanya hadir sebagai pihak yang terdampak, tetapi sebagai aktor politik yang aktif dalam membangun perlawanan melalui berbagai strategi kolektif. Perlawanan masyarakat Kendeng menunjukkan bagaimana kelompok yang termarginalkan mampu mengorganisir kekuatan sosial untuk menentang kebijakan negara yang dianggap tidak adil (Huwaina dkk, 2024). Salah satu aktor utama dalam gerakan ini adalah adanya Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), yang menjadi wadah kolektif untuk menyatukan suara masyarakat petani dari wilayah Rembang, Pati, dan sekitarnya. JMPPK ini memainkan peran strategis dalam membangun kampanye, memproduksi narasi lingkungan, serta mengadvokasi hukum. Cara masyarakat melakukan konsolidasi ini sesuai dengan konsep gerakan sosial Charles Tilly, terutama pada aspek *campaign* dan *repertoire*, di mana kelompok penolak secara terus menerus mengajukan tuntutan mereka melalui aksi demonstrasi, longmarch,

diskusi publik, hingga gugatan hukum ke PTUN dan Mahkamah Agung (Hadi dkk, 2025). Melalui tindakan berulang dan terorganisir tersebut, gerakan masyarakat Kendeng menunjukkan bentuk advokasi politik yang berkelanjutan.

Gerakan masyarakat sipil Kendeng juga memperlihatkan bagaimana kuatnya elemen WUNC (worthiness, unity, numbers, and commitment) yang sebagaimana dijelaskan oleh Tilly. Nilai worthiness terlihat dari identitas mereka sebagai petani yang mempertahankan ruang hidup untuk anak dan cucu mereka, sementara unity tampak dari solidaritas masyarakat Kendeng yang membangun tenda perjuangan di berbagai lokasi sejak tahun 2014 (Talitha dkk, 2025). Komitmen mereka terlihat dalam berbagai aksi jangka panjang, termasuk aksi simbolik “semen kaki” yang menjadi ikon perlawanan perempuan Kendeng sejak tahun 2016. Aksi yang dilakukan oleh perempuan seperti Ibu Patmi dan Sedulur Sikep dan beberapa masyarakat Kendeng lainnya, memperkuat nilai commitment sekaligus menekankan adanya peran penting perempuan dalam gerakan ekologis dalam gerakan ekofeminisme di Kendeng (Wulansari dkk, 2017). Gerakan yang dilakukan perempuan Kendeng menjadi salah satu gerakan yang dilakukan dalam dinamika perlawanan agraria. Perempuan yang dipandang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan sumber daya alam, sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi di Kendeng dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup. Melalui konsep ekofeminisme, yang melihat perempuan sebagai penjaga ekosistem dari ruang hidup yang terancam oleh adanya proyek-proyek kapitalis, keterlibatan perempuan bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai subjek politik yang aktif dalam menantang dominasi negara dan korporasi (Wulansari dkk, 2017).

Selain aksi jalanan, gerakan masyarakat sipil juga melakukan advokasi hukum sebagai strategi penting lainnya. Masyarakat Kendeng beberapa kali memenangkan gugatan di PTUN dan Mahkamah Agung, terutama ketika Mahkamah Agung membatalkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 yang memberikan izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia (Talitha dkk, 2025). Namun, kemenangan tersebut tidak ditanggapi secara adil karena pemerintah kembali menerbitkan izin baru pada tahun 2016 dan 2017. Kondisi ini menunjukkan bagaimana negara tetap mengutamakan kepentingan korporasi, meski adanya putusan hukum yang jelas, sehingga hal ini mempertegas adanya ketimpangan demokrasi substantif dalam konflik Kendeng. Dalam beberapa kasus, gerakan masyarakat sipil juga telah menghadapi intimidasi, kriminalisasi, hingga upaya diskriminasi oleh elite lokal. Namun, tekanan tersebut justru membuat bertambahnya solidaritas internal gerakan perlawanan masyarakat Kendeng, karena hal ini masyarakat lokal memaknai perlawanan sebagai upaya menjaga martabat komunitas, bukan hanya sekedar untuk mempertahankan lahan (Sufyan,

2015). Peran masyarakat sipil dalam penolakan pabrik semen di Kendeng tidak hanya berfungsi sebagai bentuk protes atas ancaman lingkungan, tetapi juga sebagai manifestasi dari praktik demokrasi akar rumput (*grassroots democracy*). Masyarakat Kendeng menentang proses pembangunan pabrik semen yang dianggap menyimpang dan merusak tanah yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Kendeng, melalui berbagai strategi seperti advokasi hukum, aksi kolektif, mobilisasi budaya, hingga gerakan ekologis yang dilakukan berbagai kalangan dari laki-laki dan perempuan, yang menjadikan gerakan Kendeng ini sebagai salah satu gerakan yang kuat di Indonesia.

Dampak Konflik Agraria Kendeng terhadap Masyarakat dan Lingkungan serta Upaya Penyelesaiannya

Konflik agraria di Pegunungan Kendeng muncul akibat rencana pembangunan dan operasi penambangan serta pabrik semen yang dianggap dapat mengancam kehidupan bagi masyarakat lokal. Bagi para warga, terutama petani, kawasan karst Kendeng bukanlah sekedar bentang alam, namun juga sebagai sumber kehidupan yang menyediakan air, tanah subur, dan ekosistem yang menopang kehidupan pertanian. Di wilayah Pegunungan Kendeng terdapat area penting yang berfungsi sebagai daerah resapan air, dikenal sebagai CAT Watuputih. Kawasan inilah yang menjadi sumber utama pasokan air yang digunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya, dengan kehadiran tambang serta pabrik semen menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya lahan pertanian, kemudian menurunnya ketersediaan air, hingga runtuhnya ketahanan pangan keluarga (Walhi, 2017). Dimana dengan situasi ini tentunya memicu penolakan yang meluas hingga mengakibatkan adanya ketegangan sosial, kriminalisasi aktivis, dan perpecahan internal antara masyarakat yang menolak dan menerima proyek. Hal ini dapat dilihat ketika puncak perjuangan para petani di Pegunungan Kendeng Utara terjadi ketika salah satu petani perempuan, Yu Patmi, yang wafat pada 21 Maret 2017 lalu, setelah melakukan aksi mengecor kakinya didepan Istana Negara, Jakarta. Dimana kepergian Yu Patmi ini menjadi simbol bahwa gerakan politik para petani Kendeng justru semakin kuat dan tidak surut, bahkan menunjukkan intensitas perlawanan yang terus bertambah. Bagi, para petani, mempertahankan kelestarian lingkungan demi masa depan anak cucu jauh lebih berarti dibandingkan menerima pembangunan pabrik semen yang dianggap dapat merusak kehidupan mereka (Pratama, 2018). Adanya tekanan yang berkepanjangan, termasuk pada proses hukum maupun tindakan pembubaran aksi, menimbulkan beban psikologis, terutama bagi perempuan yang berperan besar dalam menjaga kelangsungan rumah tangga dan sumber air, sehingga dampak lingkungan seperti ini langsung berimbas pada ketimpangan gender dan beban domestik (Walhi, 2017).

Jika dilihat dari sisi ekologis, penambangan bahan baku semen mengancam struktur karst Kendeng yang memiliki fungsi penting dalam penyimpanan air tanah. Dimana kerusakan karst berpotensi mengubah sistem hidrologi, menurunkan debit mata air, serta meningkatkan risiko kekeringan dan erosi. Konversi lahan dan aktivitas industri pun juga dapat mengancam keanekaragaman hayati, lalu menurunkan kualitas tanah, hingga memicu pencemaran debu maupun limbah yang merugikan pertanian dan kesehatan lingkungan (Huwaina dkk, 2024). Hal ini dikarenakan karst terbentuk dalam waktu yang sangat panjang, sehingga kerusakannya dapat bersifat hampir permanen, dan dapat mengakibatkan potensi kehilangan layanan ekosistem yang dapat menjadi persoalan jangka panjang. Konflik agraria Kendeng ini berlarut-larut dikarenakan lemahnya tata kelola perizinan dan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun dalam hal ini, pemerintah pernah membentuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan melakukan peninjauan ulang izin, namun pada implementasinya dinilai tidak konsisten.

Upaya penyelesaian konflik agraria di Kendeng telah ditempuh melalui berbagai jalur, terutama oleh masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil yang terus melakukan advokasi kebijakan, perlawanan politik, serta penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat dan Presiden Joko Widodo pada masa itu untuk menghentikan operasional pabrik semen (Talitha dkk, 2025). Hasil KLHS sebenarnya direncanakan pemerintah untuk menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah di kawasan Pegunungan Kendeng, namun Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, Ganjar Pranowo, justru tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Dibandingkan menjalankan rencana tersebut, ia justru mengeluarkan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia (Hukum Online, 2017). Dapat dilihat bahwa pemerintah sebetulnya telah mengambil bagian dalam berbagai langkah penyelesaian konflik, salah satunya melalui proses mediasi antara warga setempat dan PT Semen Indonesia. Namun, banyak pihak yang menilai bahwasannya pemerintah lebih memberikan prioritas pada kepentingan PT Semen Indonesia dibandingkan memperhatikan kebutuhan dan hak masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat menuntut penutupan pabrik semen dan pelepasan kawasan karst dari seluruh aktivitas penambangan sebagai upaya dalam menjaga kelestarian ekosistem serta mempertahankan hak mereka atas ruang hidup. Dengan ini, penyelesaian konflik agraria di Kendeng harus mengedepankan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan ekologis, dengan memastikan partisipasi penuh masyarakat adat dan perlindungan sebagai prioritas utama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah merupakan dampak dari ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil, di mana negara cenderung berpihak pada kepentingan industri semen melalui penerbitan izin tambang yang berulang meskipun telah adanya pembatalan oleh putusan hakim. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan bersifat top down dan mengabaikan prinsip keadilan ekologis, serta hak masyarakat atas ruang hidup. Di sisi lain, masyarakat sipil melalui berbagai bentuk aksi kolektif dan advokasi mampu menunjukkan bagaimana adanya perlawanan yang terorganisir, yang mencerminkan adanya dinamika demokrasi akar rumput. Gerakan masyarakat Kendeng memperlihatkan bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas politik untuk mempertahankan bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas politik untuk mempertahankan sumber daya dan identitas ruang hidup mereka, meskipun berhadapan dengan dominasi negara dan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Kendeng, tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi lingkungan saja, tetapi juga tentang adanya keberpihakan kebijakan, keadilan sosial, dan kualitas demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat meninjau ulang proses penerbitan izin tambang secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai aktor utama, bukan hanya sekedar penerima dampak dari persoalan yang terjadi. Pemerintah juga perlu mengutamakan prinsip keberlanjutan ekologis dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengorbankan keberlangsungan hidup komunitas agraris. Selain itu, penting bagi korporasi untuk lebih mematuhi seluruh putusan hukum dan menghindari praktik eksploitasi yang mengabaikan aspek lingkungan maupun sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam peran aktor lokal, dinamika kekuasaan di tingkat desa, serta strategi negosiasi antara masyarakat dan negara, sehingga pemahaman mengenai konflik agraria dapat lebih komprehensif dan memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Annas, M. (n.d.). Analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif. *Metode Penelitian Ekonomi Bisnis*, 56.
- Asrawijaya, E. (2020). Gerakan ekopopulisme komunitas Samin melawan perusahaan semen di Pegunungan Kendeng. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1).

- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423–5443.
- Hadi, G. S., Noviyanti, A. F., Al Fikri, M. I., & Zami, M. R. A. Z. (2025). Gerakan pemuda era reformasi: Studi kasus aksi “Indonesia Gelap” di Jember dalam perspektif Charles Tilly. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 92–108.
- Hukum Online. (2017, March 23). Koalisi masyarakat sipil kecewa penanganan kasus Kendeng (Pemerintah pusat dinilai tidak tegas). Retrieved November 18, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-masyarakat-sipil-kecewa-penanganan-kasus-kendeng-lt58d36d4205f8f/>
- Huwaina, A., Prabawati, A., & Dewi, A. (2024). Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis konflik tenurial menggunakan teori konflik Karl Marx). *Environment Conflict*, 1(1).
- Khusnia, K., & Warsito. (2018). Resolusi konflik pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Politics and Government Studies*, 7(2), 111–120.
- Maharani, N. F. (2024). Opini: Konflik pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. *Kompasiana*. Retrieved October 7, 2025, from <https://www.kompasiana.com/amp/naila21459/67605665c925c45781750942/opini-konflik-pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng-jawa-tengah>
- Pratama, A. Y., & Sumardjoko, B. (2018). *Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep konflik dan teori konflik sosial dalam pemikiran Karl Marx. *SiNORA*, 1(1), 1–11.
- Subekti, T. (2016). Konflik Samin vs PT Semen Indonesia. *Jurnal Transformative*, 2(2).
- Sufyan, A. (2015). *Gerakan sosial masyarakat Pegunungan Kendeng Utara melawan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Syawaludin, M. (2017). *Sosiologi perlawanan: Studi perlawanan repertoar petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*. Deepublish.
- Talitha, D. N., Putri, Y., & Angela, D. (2025). Penyelesaian konflik antara masyarakat Kendeng Utara dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 14(1).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2017, March 30). Perjuangan petani Kendeng, memperkuat gerakan penyelamatan kawasan karst di Indonesia. Retrieved November 18, 2025, from <https://www.walhi.or.id/perjuangan-petani-kendeng-memperkuat-gerakan-penyelamatan-kawasan-karst-di-indonesia>
- Wulandari, et al. (2019). Konflik dan perubahan kebijakan di Pegunungan Karst Kendeng: Narasi belief system dalam advocacy coalition framework. *Jurnal Transparansi*, 2(1), 1–8.
- Wulansari, I., & Sigit, R. R. (2017). Kendeng dan gerakan ekofeminisme. *Mongabay*. Retrieved October 7, 2025, from <https://mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/>